

ABSTRAK

Raihanni Salsa Billa (2022): Evaluasi Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Dasar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2020

Pelaksanaan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Saat ditemukannya ketidakberhasilan maka perlu dilakukan analisis terhadap penyebabnya. Peraturan realisasi anggaran diatur dalam PMK Nomor 258 tahun 2015 tentang pemberian sanksi berkenaan anggaran belanja. Tidak maksimalnya realisasi anggaran belanja daerah khususnya pada bidang infrastruktur dasar yang tidak mencapai 95% sesuai peraturan tentunya menjadi penghambat dalam mengoptimalkan target yang ingin dicapai terutama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui belanja daerah bidang infrastruktur dasar menggunakan teori William N. Dunn yaitu kriteria evaluasi terdiri dari enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Serta teknik analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur dasar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2020 belumlah efektif hal tersebut dikarenakan berbagai macam faktor salah satunya adalah pemberlakuan PPKM akibat pandemi covid-19 yang mempengaruhi mobilitas kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Belum efektifnya belanja daerah bidang infrastruktur dasar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung juga mempengaruhi terhadap dimensi kecukupan. Faktor-faktor yang ikut mendorong dalam keberhasilannya evaluasi belanja daerah bidang infrastruktur dasar antara lain yaitu faktor efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Kata kunci: Evaluasi, Belanja Daerah, Infrastruktur Dasar

ABSTRACT

Raihanni Salsa Billa (2022): *Evaluation of Regional Expenditures for Basic Infrastructure at the Bandung City Public Works Agency in 2020*

The implementation of policy evaluation is carried out to assess the level of success or failure of a policy. When failure is found, it is necessary to analyze the causes. The regulation on budget realization is regulated in PMK Number 258 of 2015 concerning the imposition of sanctions regarding the expenditure budget. The non-maximal realization of the regional budget, especially in the basic infrastructure sector, which does not reach 95% according to the regulations, is certainly an obstacle in optimizing the targets to be achieved, especially at the Bandung City Public Works Department in 2020.

This study aims to determine regional spending on basic infrastructure using William N. Dunn's theory, namely the evaluation criteria consists of six dimensions, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques by observation, interviews, documentation, and triangulation of data. As well as data analysis techniques ranging from data reduction, data presentation, and conclusions.

Based on the results of the study, it shows that the implementation of regional spending in the field of basic infrastructure at the Bandung City Public Works Office in 2020 has not been effective, this is due to various factors, one of which is the implementation of PPKM due to the COVID-19 pandemic which affects work mobility at the Bandung City Public Works Department. The ineffectiveness of regional spending on basic infrastructure at the Bandung City Public Works Department also affects the dimension of adequacy. The factors that contribute to the success of the evaluation of regional expenditures in the basic infrastructure sector include efficiency, equity, responsiveness, and accuracy factors.

Keywords: Evaluation, Regional Expenditure, Basic Infrastructure